



**RENCANA KERJA
KECAMATAN BANYUMAS
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN BANYUMAS**

BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini menyusun Rencana Kerja Kecamatan Banyumas (Renja Kecamatan Banyumas) Kabupaten Banyumas Tahun 2023. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 2 yang berbunyi Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas :

- a. RPJPD;
- b. RPJMD ;
- c. Renstra SKPD;
- d. RKPD; dan
- e. RENJA SKPD

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Banyumas Tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kecamatan Banyumas yang merupakan penjabaran dari visi Pj. Bupati wakil Bupati Banyumas seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kecamatan Banyumas tahun 2024-2026 yaitu :

” Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri ”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran kecamatan Banyumas Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan banyumas sebagai barometer pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas , berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata dan industri kreatifitas berbasis sumber daya lokal
5. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor kedaulatan pangan
6. Menciptakan Iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas insfraktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan

8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banyumas tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Banyumas Tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Banyumas Tahun 2024 adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasidan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2013 ;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018.
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Sedangkan tujuan :

1. Sebagai acuan Kecamatan Banyumas dalam mengoperasionalkan RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Banyumas selama tahun 2024.
3. Merumuskan keterkaitan perencanaan penganggaran pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan Kecamatan Banyumas selama tahun 2024.

I.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals). Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang startegis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD, menguraikan proses yang dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan serta penjelasan proses tersebut dilakukan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbangdes.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM

3.1 Tujuan dan sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.2 Program dan kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Banyumas. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Banyumas selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2023

Anggaran Tahun 2023 Kecamatan Banyumas baik belanja operasi maupun belanja modal sebesar Rp. 2.562.362.920,- dimana belanja

pegawai sebesar Rp. 1.667.319.200,- dan belanja barang dan jasa dan belanja modal sebesar Rp. 895,043,720,- dengan 5 program dan 12 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 1,820,567,277,- (78,78%) dimana realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 1,277,616,661 (76,62%), dan belanja langsung sebesar Rp. 542,950,616,- (60,66%) dengan capaian kinerja fisik sebesar 78,78% dan capaian kinerja keuangan sebesar 78,72%

Evaluasi Kinerja Tahun lalu (tahun 2023) dapat dilihat dalam tabel berikut:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s/d Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Banyumas

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir periode RPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2024 (tahun berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)	
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPD (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10=(9/8)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Indeks	83,1	88 Indeks	88 Indeks	100%	89 Indeks	89 Indeks	100%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	-	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	180 Laporan	-	-	-	-	60 Laporan	60 Laporan	100%
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Palayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	4 Unit	-	-	-	-	4 Unit	4 Unit	100%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	100%	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	100%
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	8 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	4 Laporan	60 Kegiatan	60 Kegiatan	100%	60 Kegiatan	60 Kegiatan	100%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase fasilitasi kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	88%	-	-	-	-	88%	88%	100%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100%
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100%
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	-	-	-	-	6 Laporan	6 Laporan	100%
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	100%	4 Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	18 Laporan	4 Kali	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	6 Laporan	100%
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	6 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90 Orang	-	-	-	-	30 Orang	30 Orang	100%
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	180 Orang	-	-	-	-	60 Orang	60 Orang	100%
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	180 Orang	-	-	-	-	60 Orang	60 Orang	100%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	36 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	100%	12 Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	144 Dokumen	-	-	-	-	48 Dokumen	48 Dokumen	100%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1320 Dokumen	25 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	440 Dokumen	440 Dokumen	100%
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4 Dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	100%
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12 Dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang	100%	9 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	7 Unit	1 Unit	2 Unit	200%	1 Unit	1 Unit	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	2 Unit	-	-	-	2 Unit	2 Unit	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Laporan	6 Laporan	-	-	-	6 Laporan	6 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	9 Orang	9 Orang	9 Orang	100%	9 Laporan	9 Laporan	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	12 Orang	12 Orang	12 Orang	100%	13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	100%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Dokumen	4 Orang	4 Orang	4 Orang	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	6 Unit	9 Unit	9 Unit	100%	9 Unit	9 Unit	100%
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	6 Unit	-	-	-	10 Unit	10 Unit	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	3 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	8 Unit	8 Unit	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	-	-	-	3 Unit	3 Unit	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	-	-	-	3 Unit	3 Unit	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100%	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%	6 Jenis	6 Jenis	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 Paket	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100%	6 Paket	6 Paket	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Paket	5 Paket	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Paket	4 Paket	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Paket	12 Paket	100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket	10 Buah	10 Buah	10 Buah	100%	24 Paket	24 Paket	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360 Laporan	520 Kali	120 Kali	110 Kali	91,6%	120 Laporan	120 Laporan	100%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1584 Dokumen	-	-	-	-	528 Dokumen	528 Dokumen	100%

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	3 Jenis	100%
--	---	---------	---------	---------	---------	------	---------	---------	------

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan di kabupaten banyumas adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
 - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
3. Koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
- a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
 - b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - c. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - d. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
4. Koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - c. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati;
5. Koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
- a. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- b. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati;
6. Koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 - a. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - b. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - c. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati;
7. Koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
 - a. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - b. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - c. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati;
8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
9. Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
 - a. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - b. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - d. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah; dan
10. Penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;

11. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan;
- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2024

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran Belanja Tahun 2024 sebesar Rp. 2.696.589.000,- dengan anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal terurai dalam 6 program dan 16 kegiatan dan 35 sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2023, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

No	Indikator	Target	Realisasi		Capaian	Kenaikan/ Penurunan
			2023	2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(6)	(7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan Banyumas	86	86,25	90	100,29%	3,75
2.	Persentase layanan kecamatan diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	-
3.	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100%	100%	100%	100%	-
4.	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	-
5.	Persentase pelaksanaan koordinasi	100%	100%	100%	100%	-

	ketentraman dan ketertiban umum					
6.	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	100%	100%	100%	100%	-
7.	Jumlah Jenis Pelayanan Di Kecamatan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	-
8.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	100%	-
9.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Keg	4 Keg	4 Keg	100%	-
10.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Keg	4 Keg	4 Keg	100%	-
11.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	100%	-
12.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100%	-
13.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	-
14.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100%	-
15.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	-
16.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Jenis	1 Jenis	9 Jenis	100%	8

17.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	-
-----	--	---------	---------	---------	------	---

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Banyumas
Kabupaten Banyumas

NO	Indikator	SPM/s tandard nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023(t nn n)	Tahun 2024(thn n+1)	Tahun 2021(thn n-2)	Tahun 2022(th n n-1)	Tahun 2023(t nn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan Banyumas			84	85	86	87	81,3	90	86,25	87	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

1. Kurangnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah;
2. Belum optimalnya partisipasi kelembagaan masyarakat terhadap program KB dan Stunting.
3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTH;
4. Belum pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak di tingkat kecamatan dan desa;
5. Belum optimalnya kualitas kader potensi sumber kesejahteraan sosial ditingkat desa dan kecamatan;
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya daerah yang mulai ditinggalkan;
7. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan desa terkendala informasi atau peraturan yang sering berubah;
8. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan desa karena belum ada kewenangan Kecamatan;

9. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan di Desa;
10. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat dikarenakan kesadaran masyarakat belum optimal dan kurangnya sosialisasi.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024 dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Banyumas sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten di bidang IT dan Kehumasan di Kecamatan Banyumas;
2. Akses informasi yang belum merata dan kurang optimalnya sarana komunikasi yang ada dalam penyelenggaraan diseminasi informasi;
3. Ketersediaan jaringan internet dan intranet masih belum optimal;
4. Belum maksimalnya integrasi data dan sistem informasi antar perangkat daerah di Kabupaten Banyumas;
5. Kurangnya staff karena beban kerja Kasi dan Kasubag yang tinggi;
6. Terkait dengan Tusi PKK masih belum optimal karena kurangnya dan belum maksimal staf teknis yang mengurus hal tersebut;
7. Banyaknya permasalahan mengenai pemberdayaan masyarakat di wilayah desa yang harus di follow up namun keterbatasan tenaga menjadi tidak bisa tercover semuanya;
8. Belum maksimal sinerginya perangkat desa yang membidang permas dan kesra dengan TKSK, PKH dan Seksi Permas di Kecamatan Banyumas;
9. Kurang maksimalnya penggunaan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat pada kantor Kecamatan Banyumas;
10. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang Pelayanan umum di tingkat Kecamatan yang lebih representatif;
11. Masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui syarat-syarat mengurus administrasi kependudukan dikarenakan minimnya sosialisasi dari Desa;
12. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap Petugas Pelayanan di Desa;
13. Belum optimalnya Ruang Konsul Pemerintahan Pelayanan;

14. Kurangnya staff yang menguasai Pemerintahan, Trantibum, dan Sub Kegiatan Umum dan Kepegawaian;
15. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan ke Desa;
16. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional linmas dalam menjalankan tugas (kendaraan patroli);
17. Personel yang harus keliling untuk mendistribusikan surat surat belum maksimal;
18. Masih adanya personil yang belum bekerja sesuai dengan Tusinyadan rangkap pekerjaan.
19. Masih lambatnya penyeteroran Laporan Kegiatan setiap Seksi.
20. Seharusnya yang menduduki jabatan eselon selayaknya mempunyai pengetahuan dan IT atau ada Staffnya yang memahami IT sehingga pekerjaan yang berhubungan dengan IT bisa di terselesaikan dan Pejabatnya paham dengan Tusinya masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kecamatan Banyumas menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Treatment). Analisis SWOT juga merupakan alat analisis untuk menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banyumas untuk lebih jelasnya hasil analisis SWOT sebagai berikut:

A. Strenght (Kekuatan)

1. Faktor kekuatan yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan publik.
2. SDM Kecamatan Banyumas didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 14 ASN dan 14 orang Honorer yang terdiri dari : S-2 sebanyak 3 orang, S-1 sebanyak 10 orang, pendidikan SMA sebanyak 13 orang, pendidikan SMP sebanyak 2 orang. Dilihat dari pendidikan regular, pegawai Kecamatan Banyumas sudah cukup baik dan hal tersebut merupakan modal dasar dalam urusan pemerintahan daerah.

3. Sarana dan Prasarana

Dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Banyumas sudah cukup memadai, baik asset yang bergerak maupun tidak bergerak.

4. Adanya tupoksi yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018. Tupoksi yang jelas merupakan modal dasar yang sangat penting, dan memberikan kekuatan yang jelas didalam melaksanakan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah.

B. Weakness (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi teknis operasional urusan pemerintahan daerah, Kecamatan Banyumas juga memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Kurangnya jumlah ASN sesuai dengan peta jabatan dan masih ada beberapa yang belum mahir IT;
2. Masih kurang disiplinnya beberapa ASN;
3. Masih sering terjadi tumpang tindih tupoksi;
4. Kebersihan Kantor dan pembagian tugas perlu dikoordinasikan lagi dan diberikan pertanggungjawaban.

C. Opportunity (Peluang)

Dari analisis strength dan weakness, perlunya menganalisis peluang-peluang yang dapat diciptakan dalam mendukung perencanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di. Peluang-peluang tersebut adalah

1. Pemberian beasiswa dari Pemda Banyumas untuk meningkatkan jenjang pendidikan dan penambahan Staff yang memahami IT dan tugasnya;
2. Tersedianya anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
3. Adanya kemauan dan keinginan dari karyawan dan karyawan untuk meningkatkan kemampuan;
4. Adanya kerjasama dengan Desa atau pihak lain untuk menyediakan data yang dibutuhkan;
5. Adanya keinginan untuk menyusun perencanaan yang baik dari berbagai pihak;
6. Adanya dukungan dari masyarakat dan legislatif ;

7. Semakin banyak pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat;
8. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada kecamatan yang lebih besar;
10. Kemajuan perkembangan teknologi dan informasi yang cepat.

D. Treatment (Ancaman)

Dalam melaksanakan tupoksinya Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas tidak lepas dari adanya ancaman yang akan mempengaruhi terhadap proses teknis operasional urusan pemerintahan daerah. Ancaman yang mungkin akan terjadi antara lain:

1. Adanya tuntutan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan dan Pelayanan;
2. Adanya aturan-aturan yang menghambat pengembangan karier pegawai;
3. Adanya bencana alam yang sering terjadi di Banyumas (banjir, angin puting beliung);
4. Kurangnya etos kerja;
5. Tingginya tingkat pengangguran;
6. Masih adanya jumlah penduduk yang miskin;
7. Belum tingginya semangat kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat.

Berdasarkan analisa SWOT diatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan

pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebihbaik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Kecamatan Banyumas yang membantu Bupati Banyumas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah bidang pelayanan publik, sehingga semakin professional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bidang administrasi pemerintahan di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana/ prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan;
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi pemerintahan;
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan di bidang administrasi pemerintahan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan di Kecamatan;
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Banyumas dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurangnya optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/ tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Tugas Kecamatan Banyumas

Kecamatan Banyumas mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan

pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
 - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
3. Koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
 - b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - c. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan

- d. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
4. Koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - c. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati;
5. Koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati;
6. Koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - b. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - c. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati;
7. Koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
 - a. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - b. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - c. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati;
8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

9. Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
 - a. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - b. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah; dan
10. Penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
11. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Isu-isu penting untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Banyumas pada tahun 2024 adalah:

1. Kurangnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah kota;
2. Belum optimalnya partisipasi kelembagaan masyarakat program KB.
3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTH;
4. Belum pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan terhadap anak di tingkat kecamatan dan Desa;
5. Belum optimalnya kualitas kader potensi sumber kesejahteraan sosial ditingkat kelurahan dan Kecamatan;
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya daerah;
7. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan desa;
8. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan desa;
9. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;

10. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat;

11. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat;

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi Kecamatan maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan RPD Kecamatan Banyumas Tahun 2024 - 2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Banyumas pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut di atas, strategi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan prima melalui pemenuhan, penerapan SOP dan PATEN;
2. Peningkatan keterlibatan organisasi pemuda dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan;
3. Peningkatan Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Masyarakat maupun Aparat Keamanan dan Ketertiban dalam Mengantisipasi berbagai Ancaman dalam Ketetraman, Ketertiban dan Kebencanaan;
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan;
5. Memberdayakan dan Membina Kader PKK untuk Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan di Desa;
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan 3R (Reduce, Reuse, Recycle);
7. Melakukan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasan APBDes;
8. Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender dan Anak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan;
9. Mewujudkan ASN yang tangguh di teknologi informasi khususnya terkait aplikasi yang berhubungan dengan E-Office.

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Menuju Pelayanan Prima sesuai Tuntutan Masyarakat;

2. Peningkatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan tingkat kecamatan dan Desa;
3. Peningkatan Pembinaan Linmas di Kecamatan dan Desa;
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan dan Desa dalam Perencanaan Pembangunan, dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan melalui Musrenbang;
5. Peningkatan Pemberdayaan dan Pembinaan Posyandu, Lembaga dan Organisasi Masyarakat;
6. Pembersihan Sampah Liar dan Fasilitasi kebersihan lingkungan dengan mengadakan even- even lintas sektoral dalam menjaga lingkungan hidup;
7. Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasan APBDes;
8. Fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan anak;
9. Pengiriman ASN ke berbagai Diklat maupun pelatihan yang terkait Aplikasi dalam Subbag Umum dan kepegawaian maupun Perencanaan dan Keuangan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal RKPD Tahun 2024 Kecamatan Banyumas telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPD Kecamatan Banyumas Tahun 2024-2026 guna dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen Rancangan Renja memuat informasi tentang rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan Awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/ tolok ukur dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/ kegiatan yang merupakan repersentasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banyumas dan Identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan pembiayaan penerimaan daerah berikut pendanaan indikatif.

**RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)KECAMATAN
BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RenstraOPD	REALISASICAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPDTAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGU NGJAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.696.589.000,00							2.758.915.000,00	
	7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI						2.696.589.000,00							2.758.915.000,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah(%)</i>				100.000	2.517.089.000,00				Peningkatan tatakelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan publik			2.540.415.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						11.750.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)			Peningkatan tatakelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan publik			12.750.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
			<i>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)</i>				100.000									
	7.01.01.2.01.00	Penyusunan Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah						5.500.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tatakelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan publik			6.250.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>		2	2	2.00		(Kecamatan Banyumas, KAB. BANYUMAS)				2.00			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RenstraOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN(Dokumen)		4	4	4			(Kecamatan Banyumas, KAB. BANYUMAS)			Kecamatan Banyumas	4		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Orang)				4	23.430.000,00		(Kecamatan Banyumas, Banyumas)	PENDAPA TANASLI DAERAH (PAD)		Kecamatan Banyumas			
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						210.000.000,00		(kantor kecamatan banyumas, Banyumas), (Kecamatan Banyumas, Banyumas)		Peningkatan tatakelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan publik			213.725.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
			Persentase Pengelolaan Administrasi Umum (%)				100.000									
	7.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.500.000,00		(Kecamatan Banyumas, Banyumas)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tatakelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan publik		5.500.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan (Paket)		6.00	6.00	6.00			(Kecamatan Banyumas, Banyumas)				6.00		
			Penyediaan Komponen InstalasiListrik				6	4.500.000,00		(Kecamatan Banyumas, Banyumas)	PENDAPA TANASLI DAERAH		Ke ca m			

7.01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Jenis)					34.000.000,00	(kantor kecamatan banyumas, Banyumas), (Kecamatan Banyumas, Banyumas)	(PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tatakelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan publik	Ke ca ma ta n Ba ny u ma s		35.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		8.00	8.00	3		(Kecamatan Banyumas, Banyumas)					3		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)				3	34.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)	PENDAPA TANASLI DAERAH (PAD)				Ke ca ma ta n Ba ny u ma s		
7.01.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(Jenis)					5.500.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)	(PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tatakelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan publik	Ke ca ma ta n Ba ny u ma s		6.500.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		4.00	4.00	4.00		(Kecamatan Banyumas, Banyumas)					4.00		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Paket)				4	5.500.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)	PENDAPA TANASLI DAERAH (PAD)				Ke ca ma ta n Ba ny u ma s		

7.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						85.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tatakelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan publik	Ke cam a ta n Ba ny u ma s		81.725.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		3.00	3.00	9		(Kecamatan Banyumas, Banyumas)					9		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				9	85.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)	PENDAPA TANASLI DAERAH (PAD)						
7.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						11.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tatakelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan publik	Ke cam a ta n Ba ny u ma s		11.500.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		30.00	30.00	2.00		(Kecamatan Banyumas, Banyumas)					2.00		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)				2	11.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)	PENDAPA TANASLI DAERAH (PAD)						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir PeriodeRenstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPDTAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							65.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas DanBerdaya Saing	Peningkatan tatakelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan publik	Kecamatan Banyumas		67.500.000,00	KECAMATAN BANYUMAS		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		115.00	115.00	6.00			(Kecamatan Banyumas, Banyumas)					Kecamatan Banyumas	6.00			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				6	65.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)	PENDAPA TANASLI DAERAH (PAD)					Kecamatan Banyumas				
	7.01.01.2.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis padaSKPD							5.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas DanBerdaya Saing	Peningkatan tatakelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan publik	Kecamatan Banyumas		6.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	3.00			(Kecamatan Banyumas, Banyumas)					Kecamatan Banyumas	3.00		
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Laporan)				3	5.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)	PENDAPA TANASLI DAERAH (PAD)					Kecamatan Banyumas			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							75.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)			Peningkatan tatakelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi			75.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS		

			<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung (Unit)</i>				4	25.000.000,00	<i>(Kecamatan Banyumas, Banyumas)</i>	<i>PENDAPA TANASLI DAERAH (PAD)</i>			<i>Kecamatan Banyumas</i>			
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							-					<i>Kecamatan Banyumas</i>		-	KECAMATAN BANYUMAS
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>				4.00						<i>Kecamatan Banyumas</i>			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RenstraOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCAN ATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							448.419.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)			Peningkatan tatakelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan publik			440.200.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
		<i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan (%)</i>					100.000									
7.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							56.369.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tatakelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan publik			40.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>			12	12	5.00		(Kecamatan Banyumas, Banyumas)				<i>Kecamatan</i>	5		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RenstraOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PA	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		8	8	8		(Kecamatan Banyumas, Banyumas)				Kecamatan Banyumas	8		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Unit)				8	7.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)	PENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Banyumas			
	7.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						45.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan publik	Kecamatan Banyumas		35.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	1	1		(Kecamatan Banyumas, KAB. BANYUMAS)				Kecamatan Banyumas	1		
			Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)				1	45.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)	PENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Banyumas			

2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						51.500.000,00				Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan publik	Kecamatan Banyumas	52.500.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan (%)				100.000								
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						20.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)					20.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan (%)				100.000								
	7.01.02.2.01.001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						10.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan publik		10.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)		0.00	0.00	4.00		(Kecamatan Banyumas, Banyumas)						4
			Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Banyumas (Laporan)				4	10.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)		Kecamatan Banyumas			

7.01.02.2.01.002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						10.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan publik	Kecamatan Banyumas		10.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS	
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		4	4	4.00		(Kecamatan Banyumas, Banyumas)					Kecamatan Banyumas	4		
		Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kegiatan)				4	10.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, KAB. BANYUMAS)	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)				kecamatan Banyumas			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						10.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)						10.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS	
		Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan (%)				100.000										
7.01.02.2.02.003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						10.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan publik			10.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RenstraOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCAN TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		4	4	4.00		(Kecamatan Banyumas, Banyumas)				Kecamatan Banyumas	4		
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Banyumas (Laporan)				4	10.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)	PENDAPA TANASLI DAERAH (PAD)						
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						5.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)						5.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
			Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum (%)				100.000									
	7.01.02.2.03.001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana						5.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tatakelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan			5.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS

		Pelayanan Umum									berorientasi pelayanan publik				
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)		0.00	0.00	3		(Kecamatan Banyumas, KAB. BANYUMAS)				3		
			Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)				3	5.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)	PENDAPA TANASLI DAERAH (PAD)		Kecamatan Banyumas			
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat						16.500.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)					17.500.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
			Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat (%)				100.000								
	7.01.02.2.04.001	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tatakelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan publik		-	KECAMATAN BANYUMAS
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)		0.00	0.00	12.00		(Kecamatan Banyumas, Banyumas)				12.00		

7.01.02.2.04.002	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Nonperizinan						11.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tatakelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan publik		12.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		12.00	12.00	12.00		(Kecamatan Banyumas, Banyumas)					12.00	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan (Laporan)				12	11.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)	PENDAPATANASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Banyumas		
7.01.02.2.04.003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						5.500.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tatakelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan publik	Kecamatan Banyumas	5.500.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)		0.00	0.00	3.00		(Kecamatan Banyumas, Banyumas)				Kecamatan Banyumas	0.00	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan (Laporan)				3	5.500.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)	PENDAPATANASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Banyumas		
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					52.000.000,00				Peningkatan tatakelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan		58.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS

												publik				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RenstraOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (R/P)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (R/P)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Persentase kegiatan Pemberdayaan Desa (%)</i>				100.000						<i>Kecamatan Banyumas</i>			
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa						36.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)						39.500.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
			<i>Persentase kegiatan pemberdayaan desa (%)</i>				100.000									
	7.01.03.2.01.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						13.500.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tatakelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan publik			14.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)</i>		4	4	4.00		(Kecamatan Banyumas, Banyumas)				4			

			<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa (Lembaga)</i>				4	13.500.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)	PENDAPA TANASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Banyumas			
7.01.03.2.01.002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan							6.500.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tatakelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan publik	Kecamatan Banyumas		7.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
			<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)</i>		0.00	0.00	4.00		(Kecamatan Banyumas, Banyumas)				Kecamatan Banyumas	4		
			<i>Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah Kecamatan (Dokumen)</i>				4	6.500.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)	PENDAPA TANASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Banyumas			
7.01.03.2.01.003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							16.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tatakelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan publik	Kecamatan Banyumas		18.500.000,00	KECAMATAN BANYUMAS

			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		0.00	0.00	4.00		(Kecamatan Banyumas, Banyumas)			Kecamatan Banyumas	4		
			Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan (Laporan)				4	16.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)	PENDAPA TANASLI DAERAH (PAD)		Kecamatan Banyumas			
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							16.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)					18.500.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
			Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat (%)				100.000								
7.01.03.2.03.001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							5.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tatakelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan publik		5.500.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)		0.00	0.00	4.00		(Kecamatan Banyumas, Banyumas)			Kecamatan Banyumas	4		
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Lembaga)				4	5.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)	PENDAPA TANASLI DAERAH (PAD)					
7.01.03.2.03.002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan							5.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan tatakelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan publik	Kecamatan Banyumas	6.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS

											Saing					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KEL OM POK SAS ARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDI KAT IF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS			TARGET	PAGU INDIKA TIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)		0.00	0.00	4.00		(Kecamatan Banyumas, Banyumas)				Kecamatan Banyumas	4		
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Laporan)				4	5.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Banyumas			
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan UsahaEkonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		0.00	0.00	4.00	6.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tatakelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan publik	Kecamatan Banyumas		7.000.000,00	KECAMA TAN BANYUM AS
			Fasilitasi Pengembangan UsahaEkonomi Masyarakat (Laporan)				4	6.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Banyumas	4		
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas				100.000	56.000.000,00				Peningkatan tatakelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan publik	Kecamatan Banyumas		56.000.000,00	KECAMA TAN BANYUM AS

			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)		2	2	4.00		(Kecamatan Banyumas, Banyumas)				Kecamatan Banyumas	4		
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)				4	6.500.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Banyumas			
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							4.500.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)						4.500.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
			Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (%)				100.000									
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia							4.500.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tatakelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan publik				4.500.000,00	KECAMATAN BANYUMAS

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA ATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PA	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)		2	2	3.00		(Kecamatan Banyumas, Banyumas)				Kecamatan Banyumas	3		
			Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan (Laporan)				3	4.500.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)						
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan				100.000	5.000.000,00				Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan publik	Kecamatan		5.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS

			<i>Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan (%)</i>										<i>Banyumas</i>			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						5.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)						5.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
			<i>Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan (%)</i>				100.000									
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						5.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tatakelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan publik			5.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)</i>		0.00	0.00	3.00		(Kecamatan Banyumas, Banyumas)				Kecamatan Banyumas	3		
			<i>Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)</i>				3	5.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)	PENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)						
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						15.000.000,00				Peningkatan tatakelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan publik	Kecamatan Banyumas		47.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
			<i>Persentase APBDes tepat waktu (%)</i>				100.000									
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						15.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)						47.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS

							100.000										
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desadan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan (%)						15.000.000,00	(Kecamatan Banyumas, Banyumas)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tatakelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan publik	Kecamatan Banyumas	12	12.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan KeuanganDesa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)		25	25	12.00			(Kecamatan Banyumas, Banyumas)								
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)				12	15.000.000,00		(Kecamatan Banyumas, Banyumas)	PENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)							
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan PemilihanKepala Desa							-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tatakelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan publik	Kecamatan Banyumas	12	35.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS	
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)		0.00	0.00				(Kecamatan Banyumas, Banyumas)								

	JUMLAH	2.696.589.000,00		2.758.915.000,00	
--	---------------	-------------------------	--	------------------	--

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kecamatan Banyumas tidak menambah usulan program dan kegiatan berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat biasanya berkaitan dengan kegiatan teknis SKPD diluar Kecamatan, namun perencanaan KUA dan PPAS tetap dilaksanakan oleh Bappeda sebagai SKPD Perencana di Kabupaten Banyumas semua kegiatan SKPD baik dari musrenbang/ masyarakat maupun usulan dari Dinas/ Lemtekda/ Badan/ Kecamatan dan Desa.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, namun demikian untuk Kecamatan tidak ada

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja, Kebijakan Nasional yang harus di dukung dan dilaksanakan oleh semua SKPD.

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kecamatan Banyumas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai SKPD yang melaksanakan urusan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik harus menetapkan tujuan sehingga Kecamatan Banyumas dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kabupaten Banyumas "**Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik dengan membangun sistem integritas Birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat**" adalah sebagai berikut:

Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Banyumas dalam jangka lima (5) tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka **sasaran pembangunan** di Kecamatan Banyumas adalah sebagai berikut : **Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.** Dengan indikator sasarannya meliputi

dua hal yaitu : Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu dan Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan

Banyumasbeserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan dalam tabel berikut :

TUJUAN	SASARAN
<i>Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima</i>	Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor – faktor yang menjadikan bahan pertimbangan SKPD kami dalam merumuskan program dan kegiatan, adalah disamping untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi SKPD juga ada pertimbangan lain seperti:

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - b. Pencapaian SDGs,
 - c. Pengentasan kemiskinan,
 - d. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
- a. Dengan adanya pertimbangan – pertimbangan melalui desk rancangan awal RKPD 2024, kami telah menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja Tahun 2024 sebagai berikut:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Pagu: **Rp. 2.696.589.000**
Kegiatan:
 - a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pagu Anggaran: Rp. 11.750.000
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Pagu Anggaran: Rp. 5.500.000,-
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pagu Anggaran: Rp. 6.250.000,-
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Pagu Anggaran: Rp. 1.701.220.000,-
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pagu Anggaran: Rp. 1.677.790.000,-
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Kecamatan Banyumas)

Pagu Anggaran: Rp. 23.430.000,-

c) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pagu Anggaran: Rp. 210.000.000,-

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Banyumas)
Pagu Anggaran: Rp. 4.500.000,-
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Banyumas)
Pagu Anggaran: Rp. 34.000.000,-
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kecamatan Banyumas)
Pagu Anggaran: Rp. 5.500.000,-
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Banyumas)
Pagu Anggaran: Rp. 85.000.000,-
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan Banyumas)
Pagu Anggaran: Rp. 11.000.000,-
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Banyumas)
Pagu Anggaran: Rp. 65.000.000,-
- 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Pagu Anggaran: Rp. 5.000.000,-

d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pagu Anggaran: Rp. 75.000.000,-

- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Banyumas)
Pagu Anggaran: Rp. 25.000.000,-
- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kecamatan Banyumas)
Pagu Anggaran: Rp. 50.000.000,-

e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu Anggaran: Rp. 448.419.000,-

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Banyumas)
Pagu Anggaran: Rp. 56.369.000,-
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Banyumas)
Pagu Anggaran: Rp. 6.500.000,-
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Banyumas)
Pagu Anggaran: Rp. 385.550.000,-
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pagu Anggaran: Rp. 70.700.000,-
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan Banyumas)
Pagu Anggaran: Rp. 18.700.000,-
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya (Kecamatan Banyumas)
Pagu Anggaran: Rp. 7.000.000,-
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya (Kecamatan Banyumas)
Pagu Anggaran: Rp. 45.000.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pagu: Rp. 51.500.000,-
- a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pagu Anggaran: Rp. 10.000.000,-
- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kecamatan Banyumas)
Pagu Anggaran: Rp. 10.000.000,-

b) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Pagu Anggaran: Rp. 20.000.000,-

1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Banyumas)

Pagu Anggaran: Rp. 20.000.000,-

c) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Pagu Anggaran: Rp. 5.000.000,-

1) Koordinasi/Sinergi dengan perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pelayanan Umum (Kecamatan Banyumas)

Pagu Anggaran: Rp. 5.000.000,-

d) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Pagu Anggaran: Rp. 16.500.000,-

1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan (Kecamatan Banyumas)

Pagu Anggaran: Rp. 11.000.000,-

2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan (Kecamatan Banyumas)

Pagu Anggaran: Rp. 5.500.000,-

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pagu: Rp. 52.000.000,-

a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Pagu Anggaran: Rp. 36.000.000,-

1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa (Kecamatan Banyumas)

Pagu Anggaran: Rp. 13.500.000,-

- 2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan (Kecamatan Banyumas)

Pagu Anggaran: Rp. 6.500.000,-

- 3) Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan (Kecamatan Banyumas)

Pagu Anggaran: Rp. 16.000.000,-

- b) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Kecamatan Banyumas)

Pagu Anggaran: Rp. 16.000.000,-

- 1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan Banyumas)

Pagu Anggaran: Rp. 5.000.000,-

- 2) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan Banyumas)

Pagu Anggaran: Rp. 5.000.000,-

- 3) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kecamatan Banyumas)

Pagu Anggaran: Rp. 6.000.000,-

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pagu: Rp. 56.000.000,-

- a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pagu Anggaran: Rp. 51.500.000,-

- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan (Kecamatan Banyumas)

Pagu Anggaran: Rp. 45.000.000,-

- 2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kecamatan Banyumas)

Pagu Anggaran: Rp. 6.500.000,-

- b) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah

- 1) Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia
Pagu anggaran : Rp. 4.500.000,-

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Pagu: Rp. 5.000.000,-

- a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah

Pagu Anggaran: Rp. 5.000.000,-

- 1) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kecamatan Banyumas)

Pagu Anggaran: Rp. 5.000.000,-

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pagu: Rp. 15.000.000,-

- a) Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pagu Anggaran: Rp.15.000.000,-

- 1) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaagunaan Aset Desa (Kecamatan Banyumas)

Pagu Anggaran: Rp. 15.000.000,-

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

II.4. RANCANGAN AWAL RENJA

Rencana Kerja Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas rancangan awal Renja dapat dilihat pada lampiran tabel berikut:

Matrik Tahun 2024-2025 berdasarkan RPD 2024-2026

Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KLMPK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
KECAMATAN BANYUMAS				Rp 2.696.589.000,00				Rp 2.758.915.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			Rp 2.696.589.000,00				Rp 2.758.915.000,00	
07.01	KECAMATAN			Rp 2.696.589.000,00				Rp 2.758.915.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88 Indeks	Rp 51.500.000,00			89 Indeks	Rp 52.500.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
7.01.02.2. 01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	100%	Rp 10.000.000,00	Kab. Banyumas		100%	Rp 20.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
7.01.02.2. 01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	Rp 10.000.000,00	Kab. Banyumas		4 Laporan	Rp 10.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS

7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan	100%	Rp 20.000.000,00	Kab. Banyumas		100%	Rp 10.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	Rp 20.000.000,00	Kab. Banyumas		60 Laporan	Rp 10.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	100%	Rp 5.000.000,00	Kab. Banyumas		100%	Rp 5.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Dokumen	Rp 5.000.000,00	Kab. Banyumas		4 Dokumen	Rp 5.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Palayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	4 Unit	Rp 5.000.000,00	Kab. Banyumas		0	Rp 0	KECAMATAN BANYUMAS

7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	Rp 16.500.000,00	Kab. Banyumas		100%	Rp 17.500.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	Rp 11.000.000,00	Kab. Banyumas		4 Laporan	Rp 17.500.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	Rp 5.500.000,00	Kab. Banyumas		4 Laporan	Rp 5.500.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	Rp 52.000.000,00			100%	Rp 58.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	100%	Rp 36.000.000,00	Kab. Banyumas		100%	Rp 39.500.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 13.500.000,00	Kab. Banyumas		6 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 14.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS

7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	8 Dokumen	Rp 6.500.000,00	Kab. Banyumas		8 Dokumen	Rp 7.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	Rp 16.000.000,00	Kab. Banyumas		60 Laporan	Rp 18.500.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase fasilitasi kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	88%	Rp 16.000.000,00	Kab. Banyumas		89%	Rp 18.500.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 5.000.000,00	Kab. Banyumas		5 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 5.500.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 5.000.000,00	Kab. Banyumas		5 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 6.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	Rp 6.000.000,00	Kab. Banyumas		6 Laporan	Rp 7.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS

07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100%	Rp 56.000.000,00			100%	Rp 56.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	100%	Rp 51.500.000,00	Kab. Banyumas		100%	Rp 51.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	Rp 45.000.000,00	Kab. Banyumas		6 Laporan	Rp 45.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	Rp 6.500.000,00	Kab. Banyumas		4 Laporan	Rp 6.500.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100%	Rp 5.000.000,00			100%	Rp 5.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS

7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	100%	Rp 5.000.000,00	Kab. Banyumas		100%	Rp 5.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Rp 5.000.000,00	Kab. Banyumas		100%	Rp. 5.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes tepat waktu	100%	Rp 15.000.000,00			100%	Rp 47.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	Rp 15.000.000,00	Kab. Banyumas		440 Dokumen	Rp 12.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pemilihan kepala desa	0	0	Kab. Banyumas		12	Rp. 35.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS

X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	Rp 2.517.089.000,00			100%	Rp 2.540.415.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
X.XX.01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp 11.750.000,00	Kab. Banyumas		5 Dokumen	Rp 12.750.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
X.XX.01.2. 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp 5.500.000,00	Kab. Banyumas		3 Dokumen	Rp 6.250.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
X.XX.01.2. 01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 6.250.000,00	Kab. Banyumas		1 Laporan	Rp 6.500.000,00	KECAMATAN BANYUMAS

X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	Rp 1.701.220.000,00	Kab. Banyumas		100%	Rp 1.737.190.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	Rp 1.677.790.000,00	Kab. Banyumas		13 Orang/bulan	Rp 1.712.695.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	Rp 23.430.000,00	Kab. Banyumas		6 Dokumen	Rp 24.495.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100%	Rp 210.000.000,00	Kab. Banyumas		100%	Rp 213.725.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Rp 4.500.000,00	Kab. Banyumas		6 Paket	Rp 5.500.000,00	KECAMATAN BANYUMAS

X.XX.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp 34.000.000,00	Kab. Banyumas		5 Paket	Rp 35.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
X.XX.01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Rp 5.000.000,00	Kab. Banyumas		4 Paket	Rp 6.500.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
X.XX.01.2. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Rp 85.000.000,00	Kab. Banyumas		12 Paket	Rp 81.725.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
X.XX.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	Rp 11.000.000,00	Kab. Banyumas		24 Paket	Rp 11.500.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
X.XX.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	Rp 65.000.000,00	Kab. Banyumas		120 Laporan	Rp 67.500.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
X.XX.01.2. 06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	528 Dokumen	Rp 5.000.000,00	Kab. Banyumas		528 Dokumen	Rp 6.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS

X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang	100%	Rp 75.000.000,00	Kab. Banyumas		100%	Rp 75.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan (unit)	0	0	Kab. Banyumas		1 unit	Rp. 15.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp 50.000.000,00	Kab. Banyumas		1 Unit	Rp 35.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Rp 25.000.000,00	Kab. Banyumas		3 Unit	Rp 25.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100%	Rp 448.419.000,00	Kab. Banyumas		100%	Rp 440.200.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 56.369.000,00	Kab. Banyumas		12 Laporan	Rp 40.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Rp 6.500.000,00	Kab. Banyumas		6 Laporan	Rp 7.750.000,00	KECAMATAN BANYUMAS

X.XX.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	Rp 385.550.000,00	Kab. Banyumas		9 Laporan	Rp 392.450.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
X.XX.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	Rp 70.700.000,00	Kab. Banyumas		100%	Rp 61.550.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
X.XX.01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	Rp 18.700.000,00	Kab. Banyumas		9 Unit	Rp 19.550.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
X.XX.01.2. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	Rp 7.000.000,00	Kab. Banyumas		8 Unit	Rp 7.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
X.XX.01.2. 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	3 Unit	Rp 45.000.000,00	Kab. Banyumas		3 Unit	Rp 35.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS

BAB V P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Kecamatan Banyumas adalah **Program Tahunan** Kecamatan Banyumas yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Kecamatan Banyumas.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Banyumas selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Banyumas. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Banyumas. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Banyumas sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Purwokerto, 29 September 2023



OKA YUDHISTIRA P, S.STP., M.Si
NIP. 19811212 200012 1 003